

***MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PROSES REVISI UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH****

SKRIPSI

Oleh

Muhamad Irsyad Hanafi

NIM. 05020422041



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Irsyad Hanafi
NIM : 05020422041
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : *Meaningful Participation* Dalam Proses Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 November 2025

Yang menyatakan,



Muhamad Irsyad Hanafi

NIM. 05020422041



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Irsyad Hanafi

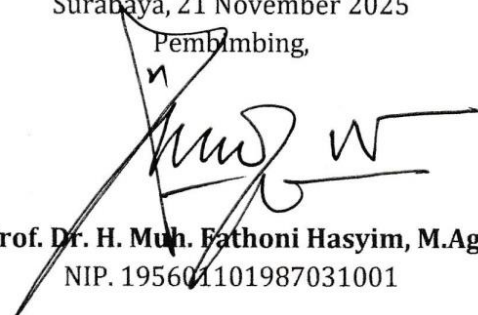
NIM : 05020422041

Judul : *Meaningful Participation* dalam Proses Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyash Dusturiyah*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 21 November 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Irsyad Hanafi
NIM : 05020422041
Judul : *Meaningful Participation* dalam Proses Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

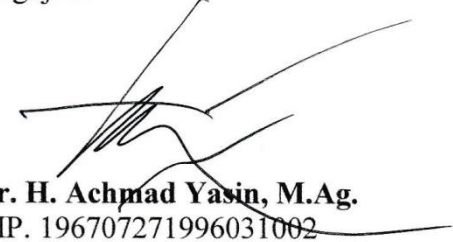
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

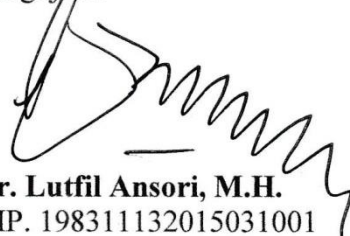
Penguji I


Prof. Dr. H. Mh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

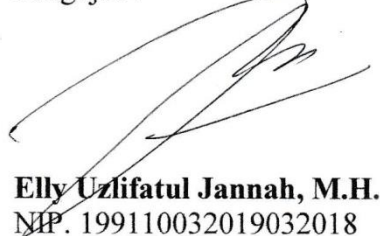
Penguji II


Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III


Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV


Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 19 Januari 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Saifurrahman Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhamad Irsyad Hanafi
NIM : 05020422041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Jurusan Hukum Publik Islam/ Prodi Hukum Tata Negara
E-mail address : mirsyad738@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Meaningful Participation dalam Proses Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

Tentang Tentara Nasional Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasa Dusturiyah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2025

Penulis

(Muhamad Irsyad Hanafi)

ABSTRAK

Revisi UU TNI menimbulkan polemik karena dianggap tidak mengakomodir prinsip *meaningful participation* sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Proses legislasi dilakukan secara tertutup, minim akses informasi, dan tanpa keterlibatan masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi hukum hasil revisi serta kesesuaiannya dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, kondisi tersebut juga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan persamaan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana *meaningful participation* diakomodir dalam proses revisi UU TNI, dan (2) Bagaimana *fiqh siyasah dusturiyah* memandang proses legislasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, serta prinsip hukum tata negara dan *fiqh siyasah*, untuk menilai kesesuaian proses revisi UU TNI terhadap kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip *syariat*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI tidak memenuhi tiga indikator *meaningful participation*, yakni hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan. Naskah akademik dan draf RUU tidak dipublikasikan sejak awal, forum pembahasan dilakukan secara tertutup, dan masukan masyarakat tidak diakomodasi secara substansial. Proses legislasi berlangsung cepat tanpa transparansi yang memadai sehingga menghilangkan fungsi legitimasi hukum, fungsi kontrol kekuasaan, dan fungsi edukasi politik. Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, praktik legislasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-syura*), kemaslahatan (*'maslahah 'ammah*), dan persamaan hak (*al-musawah*), karena negara seharusnya menjalankan proses hukum yang terbuka dan melibatkan publik demi menjaga kemaslahatan umum.

Penelitian ini menyarankan agar DPR dan Pemerintah menjamin penerapan *meaningful participation* dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, termasuk keterbukaan naskah akademik, penyelenggaraan konsultasi publik yang substantif, serta pemberian penjelasan terhadap seluruh masukan masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* perlu dijadikan rujukan etis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga proses legislasi tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	21
J. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
KAJIAN TEORI PARTISIPASI PUBLIK DAN <i>FIQH SIYASAH</i>	
<i>DUSTURIYAH</i>	26
A. Teori Partisipasi Publik	26
1. Pengertian Partisipasi Publik.....	26
2. Ruang lingkup Partisipasi Publik	27
3. Fungsi Partisipasi Publik	29
B. Teori <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	32

1. Konsep <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	32
2. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	34
BAB III	43
MEANINGFUL PARTICIPATION PROSES REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022	43
A. Indikator <i>Meaningful Participation</i>	43
1. Hak untuk didengarkan	43
2. Hak untuk dipertimbangkan	45
3. Hak untuk memperoleh kejelasan	46
B. <i>Meaningful Participation</i> dalam Proses Revisi UU TNI	48
C. Analisis Revisi UU TNI dalam Perspektif Teori Partisipasi Publik	59
BAB IV	63
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PROSES REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA	63
A. Wewenang dan Tugas <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	63
B. Analisis Revisi UU TNI dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	65
BAB V	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	85
BIOGRAFI PENULIS	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. RUU <i>Carry Over</i> dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.....	53
Tabel 2. RUU <i>Carry Over</i> dalam Prolegnas Prioritas 2025.....	53
Tabel 3. Risalah sidang Paripurna Pembicaraan tingkat II UU TNI.....	56



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Edisi 1 Ce. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenadama Group, 2017.
- Naja, H.R. Daeng. *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori & Praktek*. 1st ed. Ponorogo: Uwais Insprasi Indonesia, 2023.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. 1st ed. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Edited by Anis Fuadi and Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

ii. Jurnal

- Abdullah. "Reformasi Hukum Dalam Cengkeraman Oligarki: Menelusuri Kesenjangan Legitimasi Konstitusional Dan Kepentingan Elite." *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 85–100. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1353>
- Abidin, M Zaenal, and Nurul Azizah. "Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakillan Perwaliannya." *Jurnal Istidlal* 1, no. 2 (2017): 179. https://www.researchgate.net/publication/334577593_Pandangan_Tokoh_NU_Tentang_Hadirnya_Wali_yang_Telah_Mewakillan_Perwaliannya.
- Ajeng Rana Amelia Nugraha, Rachmawati Novaria, and Dida Rahmadanik. "Analisis Dampak Partisipasi Masyarakat Pada Perekonomian Keluarga Di Kampung Wisata Batik Okra Surabaya." *Public Service and Governance Journal* 6, no. 2 (2025): 124–136. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i2.2899>.
- Alif, L M, and Suci Fitrianiingsih. "Pentingnya Partisipasi Yang Bermakna Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia)." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 71–82. <https://mhn.bphn.go.id/> DOI : 10.33331/mhn.v54i1.420
- Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1

(2023): 306–318. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>

Arief Fahmi Lubis. “Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 2, no. 3 (2024): 44–50. <https://doi.org/10.56910/wrd.v2i3.372>.

Artioko, Fiqih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–83. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.

Aryani, Christina. “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law Reformulating the Legislative Drafting System Through the Implementation of Indonesian.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 27–48. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>

Azmi, Muhammad Ardian Maulana, and Akhmad Zaki Yamani. “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat).” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 326–341. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1110>

Azzahra, A N, Y Janwari, and L F Rizal. “Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11818–11832. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2193>.

Begouvic, M Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perpektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75. <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls/article/view/489>

Bintang, Ahdian Syah Putra, Annisa Putri Rezeki, Fahrani, Lailan Hafni Gulo, and Tri Anisah. “Membangun Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *TABAYYUN: Journal Of Islamic Studies* 01, no. 01 (2023): 68–80. <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/15>

Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha. “Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia : Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–2540. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18664/12669>.

Dondokambey, Sarah Malena Andrea. “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626>

- Fadli, Adzikri, and Sulastri Caniago. "Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 3 (2022): 306–312. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/111710867/3125>.
- Fakhira, Rana, and Rahmat Salam. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan." *Pentahelix: Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2023): 121–128. <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5096>.
- Faruk, Raihan Maulana, Ridwan Eko Prasetyo, and Budi Tresnayadi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Rencana Pembangunan Daerah Di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 1143–1155. <https://greenpub.org/JIM/article/view/1147>
- Fikriana, Askana, and Muhamad Aidil Fitri Yadi. "Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah)." *Dalihan Na Tolu Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 01 (2023): 39–43. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.273>
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang- Undang : Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis." *Jurnal Konstitusi: Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia* 21, no. 2 (2024): 204–225. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=dvvKH5AAAAAJ&citation_for=view_dvvKH5AAAAAJ:ULOm3_A8WrAC
- Firdaus, Muhammad Taufiq. "Urgensi Paradigma Legisprudence : Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang- Undang Kementerian Negara The Urgency of the Legisprudence Paradigm : The Practice of Abusive Legislation in the Revision of the State Ministry Law." *Jurnal APHTN-HAN* 4, no. 1 (2024): 45–64. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.169>
- Hakim, Ahmad Burhan, and Satryo Pringgo Sejati. "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 73–81. <https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.852>
- Hanafi, Muhamad Irsyad, Lutvi Dafina Damayanti, Indah Nazulfa, and Article Information. "Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Implementation of Community Participation in the Formation of Legislation." *Constitution Journal* 3, no. 2 (2024): 193–210. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.113>
- Herdiansyah, Denni, Muhammad Royhan, and Fauziah Lubis. "Pandangan Islam

- Mengenai Surat Kuasa Profesi Advokat Dengan Al-Wakalah Ditinjau Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an Dan Hadis.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 3, no. 3 (2023): 695–704. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2927>.
- Hofifah, Saifuddin, Misbahul Wani, and Alfaenawan. “Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja ‘Involvement of Lawmakers in the Legal Process Following the Unconstitutional Decision of the Job Creation Law.’” *Equality: Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2025): 42–61. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v2i1.149>
- Humah, Darsis. “Evaluation of the Legislative Process in the Revision of the TNI Law : Transparency , Public Participation , and Constitutionality.” *JKH: Jurnal Hukum dan Keadilan* 2, no. 6 (2025): 19–27. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i6.452>.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–152. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Huzaimah, Arne, and Syaiful Aziz. “Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom Pada Perkara Hadhānah Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqāshid Al-Syarī ’ Ah.” *Jurnal Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 125–150. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.3383>.
- Ishomuddin, Moh. “Penyimpangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Dengan Prinsip Meaningfull Participation.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v5i10.863>
- Iskandar, Dadi Junaedi. “Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>.
- Izzaty, Risdiana. “Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia (The Urgency of Carry-Over Provision in Law-Making in Indonesia).” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>.
- Kafin Muhammad. “Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *JIL: Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (2023): 1–26. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1.1000>.
- Lado, Zola, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, and I Ketut Winaya. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Studi Kasus: Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah).”

- Business and Investment Review (BIREV)* 1, no. 4 (2023): 35–44.
<https://doi.org/10.61292/birev.v1i4.36>.
- Mahatta, Afdhal, and Satrio Alif Febriyanto. “Implementasi Konsep Partisipasi Bermakna Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Kasus Pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024): 11–23.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>.
- Makie, Haji Ahmad, and Widiya Aris Rindiani. “Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu: Membangun Kepercayaan Dan Partisipasi.” *Al Washliyah : Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 24–34. <https://doi.org/10.70943/jsh.v2i1.69>.
- Mandak, Ardila Putri Ananda. “Penerapan Partisipasi Masyarakat Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 5 (2024): 1–17.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56821>
- Maritza, Dhiya Fahriyyah, and Taufiqurokhman Taufiqurokhman. “Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2024): 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>.
- Muttaqin, Entol Zaenal, and Sahrul Hikam. “Konsep Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 62–80. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>
- Nasution, Ali Imran, and Rahmat Bijak Setiawan Sapii. “Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2022): 202. <https://www.researchgate.net/profile/Ali-Nasution-3/publication>.
- Nugraha, Harry Setya, Alfian Alfian, and Novita Fitriani. “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 77–106. <https://doi.org/10.55292/vrrsqy14>.
- Nurfatima, M. Taufan B., and Muhammad Taufik. “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 211–236.
<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45>.
- Nurhasananda, Adwin Atinna, and Mutaqin Akbar. “Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Undang-Undang Tentara Nasional

- Indonesia (UU TNI) Menggunakan Support Vector Machine.” *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi* 5, no. 1 (2025): 1–14. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/KOMITEK%0Ahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Patabang, Hira, and Teny Anggara Pramanajati. “Urgensi Fitur Feedback Pada Pengembangan Aplikasi E-Perda Dprd Kota Salatiga Dalam Rangka Perwujudan Meaningful Participation.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 6, no. 1 (2024): 19–38. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no1.p19-38>.
- Pramanajati, Teny Anggara, and Hira Patabang. “Urgensi Fitur Feedback Pada Pengembangan Aplikasi E-Perda Dprd Kota Salatiga Dalam Rangka Perwujudan Meaningful Participation.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 6, no. 1 (2024): 19–38. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no1.p19-38>
- Prasetyo, Muhammad Jodi. “Implementasi Pemikiran Politik Al-Mawardi Dalam Kebijakan Publik Dan Pembangunan Sosial Di Indonesia.” *Jurnal JISI POL* 9, no. 3 (2025): 103–116. <https://orcid.org/0009-0002-8789-1899>
- Prastyo, Angga. “Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>
- Pratama, Nur Aji. “Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Crepido* 4, no. 2 (2022): 137–147. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>.
- Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, and Nanang Naisabur. “Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27–42. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141> Haris.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, and Wismanto Wismanto. “Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–230. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.
- Quddus, Muh. Syah, and Febri Muhammad Firdaus. “Dualisme Peran Tni: Bagaimana Uu Tni Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil Dan Tata Kelola Pemerintahan?” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 464–473. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8686>
- Ramadhan, Achmad Fauzan. “Hukum Dan Demokrasi: Sinergi Negara Hukum Dan Partisipasi Warga Negara.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 192–202. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law>. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1814>
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum

- Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rizki, Muhammad, and Haniah Hanafie. “Penggunaan Aplikasi Laksa Dalam Mewujudkan Tranparansi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Tangerang.” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 1 (2023): 28–36. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.2813>.
- Rohmah, Siti Ngainnur, and Abdur Rahim. “Implementasi Pancasila Sila Ke 5 Di Ma’ Had Al -Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Dan Siyasah Dusturiyah.” *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 10 (2024): 11610–11622. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6011>
- Sakhi, Dwi Fa’yi Arya, Putri Aprilyana Idi Amin, and Kurniati. “Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer : Perspektif Al-Mawardi.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10, no. 2 (2024): 95–106. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Falsafah/article/view/3052>
- Salam, Nur Zulfah Binti Md Abdul, Nurul Farhana Binti Yahaya, Muhammad Hafifi Bin Hashim, and Sharifah Hana Abd Rahman. “Amalan Perwakilan Peguam Syarie Dalm Islam: The Practice of Representation by Syarie Lawyer in Islam.” *Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi* 7, no. 2 (2020): 47–67. <https://journal.laaroiba.com/index.php/elmujtama/article/view/2927>.
- Sarah Malena Andrea Dondokambey. “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum Volume* 9, no. 2 (2023): 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626>.
- Siagian, Saidah, John Kenedi, and Miti Yarmunida. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 73–96. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410>
- Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3190–3202. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5.1698>.
- Simanjuntak, Pran Mario, Rizky Julranda, and Sultan Fadillah Effendi. “Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>
- Sparingga, Alan. “Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 76–101. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.

- Syarif, Akbar, and Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis." *Jurnal Ijtihad Gontor* 10, no. 2 (2016): 1–20. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>
- Tolinggi, Rizkiyani Amelia, Isman Bruaharja, and Adiesty S. P. Syamsuddin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 25–38. <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/ISN>
- Ujung, Floridus, Husein Hasan, Rossa Mina Kumanireng, Rifky Imanuel Nenabu, Yairus Thomas Alelang, Yani Erina Elisabet Nitbani, and Fadil Mas'ud. "Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU No 34 Tahun 2004 Pada Pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 309–315. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/401>
- Utami, Pratiwi. "Analisis Respons Publik Di Media Sosial Terhadap Proses Legislasi RUU TNI Dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif Pratiwi Utami." *Jurnal Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 1 (2025): 138–156. <https://scholar.google.com/citations?user=PENuwxkAAAAJ&hl=id&oi=sra>
- Wadhoni, Rike Sukma, Edi Yuhermansyah, and Riadhus Sholihin. "Aturan Kampanye Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 456–470. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14759>
- Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>
- Wangku, Juliano A, Ainu P Taolin, Maria F A L Ola, G Delprila, Antonius P Kares, and Fadil Mas'ud. "Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No . 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 328–345. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.305>
- Wicaksana, Febrian Arif, Saipul Nasution, Meutya Amalia, and Muhsin Arafat. "Constitutionality of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 From the Perspective of Constitutional Law and Fiqq Siyasah Dusturiyah." *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2023): 278–306. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14356>
- Widiyarta, Agus, and Ertien Rining N. "Dinamika GovernancPelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance." *Jurnal Dinamika Governance* 6, no. 1 (2016): 64–81.

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>.

Yahya, Muhammad. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1354–1363. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6396>.

Yosarie, Ikhsan, and Oktaviani. "Revisi Tanpa Semangat Reformasi: Residu Dwifungsi ABRI Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia: Revision Without the Spirit of Reform: Residues of the ABRI's Dual Function in the Revision of Law Number 34 of 2004." *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 22, no. 1 (2025): 22–31. <https://doi.org/10.21831/socia.v22i1.88970>

Yuliati, Sari, I Dewa Ayu Widyani, Tomson Situmeang, and Jimmy Simanjuntak. "Implementasi Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Di DPR RI Studi Kasus: Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Hukum To-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 2 (2025): 253–266. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.584>

iii. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

iv. **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025, tentang Pengujian Formi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia, tanggal 17 September 2025.

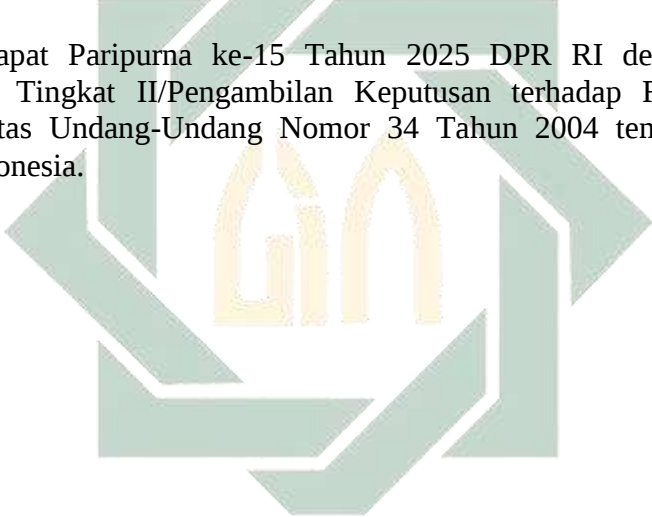
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tentang pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

v. **Data Elektronik**

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 Tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025, tanggal 19 November 2024.

Tracking Perkara Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, <https://tracking.mkri.id/index.php?id=1&jenis=2&menu=4&page=web.home>. Akses, 19 Oktober 2025.

Risalah sidang rapat Paripurna ke-15 Tahun 2025 DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A